RENCANA KERJA
(RENJA)
2026

KECAMATAN WASUPONDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kecamatan Wasuponda dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini disusun sebagai dasar/acuan Pemerintah Kecamatan Wasuponda dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 1 (satu) satu tahun (Tahun 2026) dan sebagai indikator terhadap capaian keberhasilan yang telah ditargetkan pada Renstra kurun waktu Lima tahun (2025-2029).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kecamatan Wasuponda yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini representatif dan lebih baik.

Wasuponda, 18 Juni 2025

Camat Wasuponda,

ALAMSYAH, S. STP
Pangkat : Penata Tk. I, IIId
NIP. 19930318 201406 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB. I PENDAHULUAN 1

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2022 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Wasuponda 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6

KABUPATEN/KOTA, meliputi kegiatan dan sub kegiatan : 6

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 8

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wasuponda 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Wasuponda 19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....20
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....29
BAB III.....31
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....31
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Wasuponda 31
3.3. Program Dan Kegiatan 33
BAB IV 54
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....54
TAHUN 2026 54
BAB V 61

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 01 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Wasuponda s/d Tahun 2026.
2. Tabel. 02 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wasuponda
3. Tabel. 03 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
4. Tabel. 04 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wasuponda Tahun 2026
5. Tabel. 05 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
6. Tabel. 06 Alokasi Anggaran Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur Tahun 2026

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban setiap tahunnya untuk menyusun Renja tersebut.

Renja Kecamatan Wasuponda Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum Kantor Kecamatan Wasuponda dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 tambahan lembaran daerah Nomor 168);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan Kecamatan Wasuponda tahun 2026 sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur adalah :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;
- Menciptakan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan WasupondaTahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan Wasuponda

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wasuponda

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wasuponda

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wasuponda

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V P E N U T U P

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Wasuponda

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wasuponda tahun 2025 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gad*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran **Tahun 2025** dan evaluasinya dapat dilihat di bawah ini :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, meliputi kegiatan dan sub kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
   - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
   - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
   - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Pemerintahan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tentang Evaluasi Hasil Renja dan Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Kecamatan Wasuponda **Tahun 2024** dapat dilihat di **Tabel. 1**:

TABEL 1
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2024	
													I		II		III		IV				
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	
				K		Rp (,000)	K		Rp (,0)	K		Rp (,000)	K	Rp (,000)	K	Rp (,000)	K	Rp (,000)	K	Rp (,000)	K	Rp (,000)	K	Rp (,000)
		URUSAN….																						
		KANTOR KEC. WASUPONDA																						
1	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terpenuhi**			**0**			**0**	**100**	**%**	**2,668,757,600**		**258,993,209**	**0**	**0**	**0**	**1,401,201,915**	**0**	**-**	**0**	**1,829,299,827**	**0**	**0**
	2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**									**40,651,400**		**360,000**	**0**	**0**	**0**	**11,653,120**	**0**	**0**	**0**	**12,013,120**	**0**	**0**
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun tepat waktu	2	Dok	56,701,942	3	Dok	7,525,100	3	Dokumen	24,452,950	1	-	0	0	1	3,802,950	0	0	**2**	**3,802,950**	67%	15.55
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	Dok	28,932,854	1	Dok	5,690,000	2	Dokumen	3,913,800	1	360,000	0	0	1	820,520	0	0	**2**	**1,180,520**	100%	30.16

	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	Dok	19,439,251	2	Dok	2,955,900	2	Dokumen	3,682,200	1	-	0	0	1	1,252,200	0	0	**2**	**1,252,200**	100%	34.01
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	Dok	100,924,236	10	Dok	26,851,100	10	Dokumen	8,602,450	3	-	0	0	1	5,777,450	0	0	**4**	**5,777,450**	40%	67.16
	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**									**2,019,642,800**		**209,608,828**				**1,194,428,295**				**1,404,037,123**		
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan	16	org	9,577,795,095	64	org	1,647,157,893	16	org	1,995,272,850	16	208,518,828	15	0	15	1,180,668,295	0	0	46	1,389,187,123	288%	69.62
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	18	Dok	175,996,052	17	Dok	24,265,000	17	Dok	24,369,950	3	1,090,000	3	0	3	13,760,000	0	0	9	**14,850,000**	53%	60.94
	2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**									**12,854,950**		**540,000**				**6,750,000**						
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4	Dok	75,274,809	4	Dok	11,404,900	4	Dok	12,854,950	1	540,000	1	0	1	6,750,000	0	0	3	**7,290,000**	75%	56.71
	2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian kinerja admnistrasi Kepegawaian PD**									**37,717,000**		**-**				**34,215,000**				**34,215,000**		
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12	Dok	49,557,725	12	Dok	9,956,800	12	Dok	7,037,000	4	-	1	0	2	5,677,000	0	0	7	5,677,000	58%	80.67
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	4	org	159,530,000	5	org	5,450,000	4	org	30,680,000	1	-	1	0	1	28,538,000	0	0	3	28,538,000	75%	93.02

			perundang - undangan																				
	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**								**244,892,650**		**34,251,600**		**-**		**134,870,500**				**169,122,100**		
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	10	Jenis	27,534,950	6	Jenis	1,868,000	6	Jenis	9,591,000	6	897,000	6	0	6	1,167,000	0	0	18	2,064,000	300%	21.52
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3	Jenis	53,287,800	20	Jenis	10,275,000	20	Jenis	10,275,000	5	3,082,500	5	0	5	8,516,000	0	0	15	11,598,500	75%	112.88
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	2	Jenis	90,681,800	2	Jenis	10,740,000	5	Jenis	9,916,650	3	391,100	0	0	1	2,025,000	0	0	4	2,416,100	80%	24.36
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Exp)	24	Exp	27,660,000	24	Exp	2,700,000	24	Exp	2,640,000	6	-	0	0	6	0	0	0	12	**-**	50%	-
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	17900	org	618,250,000	2250	org	184,235,000	2500	org	86,620,000	625	12,021,000	50	0	50	48,035,000	0	0	725	**60,056,000**	29%	69.33
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	2249	kali	1,321,710,000	499	kali	221,627,080	869	kali	125,850,000	100	17,860,000	150	0	250	75,127,500	0	0	500	92,987,500	58%	73.89
	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi									**25,000,000**		**-**								**-**		
	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4	Unit	0	0	unit	30,000,000	1	Uni	25,000,000	1	-	0	0	0	0	0	0	1	-	100%	-
	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan**									**219,329,900**		**7,119,781**								**183,514,484**		

			daerah																				
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	5100	Surat	80,559,344	800	Surat	15,697,500	600	Surat	14,229,900	150	2,178,000	100	0	150	1,985,000	0	0	400	4,163,000	67%	29.26
	;02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	48	Rek	258,000,000	48	Rek	57,216,323	48	Rek	48,000,000	6	4,941,781	6	0	24	24,884,703	0	0	36	29,826,484	75%	62.14
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Jenis	34,100,000	2	Jenis	11,010,000	2	Jenis	8,700,000	1	-	1	0	1	8,700,000	0	0	3	8,700,000	150%	100.00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	9	org	567,000,000	9	org	146,250,000	12	org	148,400,000	12	-	12	0	12	140,825,000	0	0	36	140,825,000	300%	94.90
	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**									**68,668,900**		**7,113,000**				**19,285,000**				**26,398,000**	#DIV/0!	
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	8	Unit	204,680,000	8	Unit	27,027,000	8	Unit	44,338,900	8	3,330,000	8	0	8	8,535,000	0	0	24	11,865,000	300%	26.76
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	29	Unit	78,140,000	23	Unit	13,086,000	21	Unit	14,330,000	21	3,783,000	10	0	10	750,000	0	0	41	4,533,000	195%	31.63
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	Unit	155,000,000	2	Unit	10,000,000	2	Unit	10,000,000	1	-	0	0	1	10,000,000	0	0	2	10,000,000	100%	100.00
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
2	**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan**			**0**			**0**	**12**	**Laporan**	**5,339,300**		**-**		**0**		**0**		**0**		**-**		

			publik																					
	2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan**									**5,339,300**		**-**								**-**		
	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	235	Lbr	97,857,500	26	Lbr	-	12	Laporan	5,339,300	3	-	0	0	0	0	0	0	3	-	25%	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
3	**03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan**			**0**			**0**			**60,819,150**		**5,618,200**		**0**		**19,524,000**		**0**		**25,142,200**		
	2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**									**60,819,150**		**5,618,200**		**-**		**19,524,000**		**-**		**25,142,200**		
	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kecamatan	35	Persen	77,337,810	40	Persen	10,970,000	130	Org	11,723,950	130	2,613,200	0	0	65	8,469,000	0	0	195	11,082,200	150%	94.53
	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kader PKK Desa yang di berdayakan	42	org	376,824,227	42	org	103,048,000	42	Org	49,095,200	42	3,005,000	0	0	42	11,055,000	0	0	84	14,060,000	200%	28.64
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
4	**04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum**			**0**			**0**			**11,510,000**		**-**		**-**		**1,176,000**		**0**		**1,176,000**		

	2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketetiban umum yang dilaksanakan**									**7,938,000**		**-**				**1,176,000**				**1,176,000**		
	01	Koordinasi Sinegitas dengan kepolisian negara republik indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	18	Kali	20,000,000	0	-	2,411,800	5	Kali	3,320,000	0	-	0	0	3	1,176,000	0	0	3	1,176,000	60%	35.42
	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenraman dan ketertiban yang dilaksanakan	13	Kali	42,000,000	0	-	2,616,000	12	Kali	4,618,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	-
	2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada**									**3,572,000**												
	01	Koordinasi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di budang penegak peraturan perundag undangan/ atau kepolisian negara RI	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	2	Kali	24,000,000	0	-	1,170,000	12	Kali	3,572,000	3	1,260,000	0	0	0	0	0	0	3	1,260,000	25%	35.27
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
5	**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**			**0**			**0**			**18,149,300**		**4,900,000**		**0**		**7,740,000**		**0**		**12,640,000**		
	01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang di selenggarakan									**18,149,300**		**4,900,000**				**7,740,000**				**12,640,000**		

	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan.	12	Kali	181,442,698	12	Kali	17,413,700	12	Kali	18,149,300	3	4,900,000	3	0	4	7,740,000	0	0	10	12,640,000	83%	69.64
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
6	**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**			**0**			**0**			**9,762,000**		**1,050,000**		**-**		**5,016,000**		**0**		**6,066,000**		
	2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan**									**2,290,000**		**1,050,000**		**-**		**5,016,000**				**6,066,000**		
	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	12	Kali	37,175,485	6	Kali	15,000	12	Dok	2,290,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	-
		FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										**7,472,000**												
	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	6	Desa	40,000,000	0	-	519,000	6	Kali	7,471,050	0	1,050,000	0	0	4	5,016,000	0	0	4	6,066,000	67%	81.19
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**2,774,337,350**		**270,561,409**				**1,434,657,915**		**-**		**1,874,324,027**	**67.56 %**	

Kecamatan Wasuponda

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM …)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM …)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya:
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wasuponda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan., Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan daerah, maka SKPD membuat laporan evaluasi atas rencana kerja yang dilaksanakan setiap periode pembangunan yang mengacu ke rencana stategisdan RPJMD.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang talah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel. 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Target				Realisasi Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	75,95	76,90	78,50	80	99,52	127	93,42	93,41
Nilai Score Lakip Kecamatan	77	78	78	81	-	62,76	67,30	51,70

Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Wasuponda sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wasuponda

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2024 terkait pelayanan publik di Kecamatan Wasuponda. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakanan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2024 Kantor Kecamatan Wasuponda sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target dengan target survey 80 dan terealisasi 93,41, artinya pelayanan yang ada dikecamatan Wasuponda baik perizinan maupun non perizinan cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kelurahan tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wasuponda

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2024 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Wasuponda. Pada tahun 2023 target dan realisasi nilai AKIP dengan target 78 dan terealisasi B (67,30) dan tahun 2024 dengan target nilai B (81) dan namun terealisasi 51,70 (CC). Realisasi yang dicapai sangat rendah disebabkan target yang terlalu tinggi sementara dokumen perencanaan yang disusun masih banyak yang belum sesuai, di samping iitu kurangnya partisipasi ASN dalam lingkup kecamatan wasuponda dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan. Hal lain yang menyebabkan turunyya nilai capaian Lakip 2024 antara lain yaitu :

- Masih ada Indikator kegiatan tidak dapat di ukur
- Pendukung atas capaian program dan kegiatan belum maksimal

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wasuponda

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan WasupondaKabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2026 antara lain :

1. SDM yang masih kurang dan belum sepenuhnya terampil.
2. Sarana dan prasarana belum lengkap sesuai dengan kebutuhan
3. Sistem dan prosedur kerja yang belum optimal
4. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
5. Kemampuan personil kecamatan terbatas
6. Anggaran yang terbatas
7. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya dari kelompok perempuan dari segi kehadiran bisa dikatakan cukup baik hanya saja masih kurang dalam memberikan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok perempuan dalam musrenbang. Sehingga sebagian besar usulan dalam musrenbang adalah berkaitan dengan infrastruktur.

- **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

  Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas masih kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan kurangnya pemahaman ASN terkait pemanfaatan teknoloogi, terkaitdan secara ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimanana mestinya.

- **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

  Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun faktor eksternal, aparatur kecamatan tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Namun dengan sarana dan prasarana yang terbatas di kantor kecamatan Wasuponda, pelayanan prima masih

belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dengan kondisi tersebut aparatur kecamatan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat

- **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

  Kurang seimbangnya dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara internal dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan methodologinya dengan permasalahan / tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Wasupondam dilakukan beberapa hal :

1. Memanfaatkan Sumber Daya yang ada dengan sebaik mungkin serta memberikan pemahaman terkait pentingnya pemanfaatan teknologi dalam rangka penyelesaian pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan Wasuponda untuk dapat memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
3. Turut mengundang dan mensosialisasikan kepada kelompok perempuan agar dapat lebih berperan aktif didalam kegiatan musrenbang, sehingga kelompok perempuan dapat lebih di berdayakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2024. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Kantor Camat Wasuponda Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3

Tabel .3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Luwu Timur

SKPD : KANTOR KECAMATAN WASUPONDA

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar (%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**2.611.748.350**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar (%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**2.611.748.350**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**40.630.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**40.630.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	20.010.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	20.010.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	3.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	3.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	5.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	5.600.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	13 Laporan	11.120.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	13 Laporan	11.120.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Yang Terselenggara Dengan Baik**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**2.022.771.350**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Yang Terselenggara Dengan Baik**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**2.022.771.350**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Kantor Kec. Wasuponda	23 Orang	2.002.141.350	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Kantor Kec. Wasuponda	23 Orang	2.002.141.350	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Wasuponda	19 Laporan	20.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Wasuponda	19 Laporan	20.630.000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**12.538.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**12.538.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Kantor Kec. Wasuponda	7 Laporan	12.538.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Kantor Kec. Wasuponda	7 Laporan	12.538.00	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian PD**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**23.339.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian PD**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**23.339.000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	Kantor Kec. Wasuponda	17 Dokumen	4.297.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	Kantor Kec. Wasuponda	17 Dokumen	4.297.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Kantor Kec. Wasuponda	4 orang	19.042.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Kantor Kec. Wasuponda	4 orang	19.042.000	

5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**222.346.900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**222.346.900**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kantor Kec. Wasuponda	20 Paket	8.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kantor Kec. Wasuponda	20 Paket	8.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Wasuponda	20 Paket	12.073.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Wasuponda	20 Paket	12.073.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Wasuponda	6 Paket	7.720.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Wasuponda	6 Paket	7.720.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (examplar)	Kantor Kec. Wasuponda	24 Dokumen	2.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (examplar)	Kantor Kec. Wasuponda	24 Dokumen	2.640.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Kantor Kec. Wasuponda	1700 Orang	93.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Kantor Kec. Wasuponda	1700 Orang	93.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Kantor Kec. Wasuponda	120 Kali	97.913.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Kantor Kec. Wasuponda	120 Kali	97.913.000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**20.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**20.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kantor Kec. Wasuponda	1 Set	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kantor Kec. Wasuponda	1 Set	20.000.000	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100 %**	**211.213.100**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100 %**	**211.213.100**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Kantor Kec. Wasuponda	1000 surat	12.095.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Kantor Kec. Wasuponda	1000 surat	12.095.100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Kantor Kec. Wasuponda	36 rekening	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Kantor Kec. Wasuponda	36 rekening	48.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor Kec. Wasuponda	2 Jenis	8.700.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor Kec. Wasuponda	2 Jenis	8.700.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kantor Kec. Wasuponda	7 Orang	142.418.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kantor Kec. Wasuponda	7 Orang	142.418.000	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**58.910.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**58.910.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan Yang Dipelihara	Kantor Kec. Wasuponda	9 unit	30.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan Yang Dipelihara	Kantor Kec. Wasuponda	9 unit	30.440.000	
	Pemeliharaan Peralatan dn Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kantor Kec. Wasuponda	26 unit	8.470.000	Pemeliharaan Peralatan dn Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kantor Kec. Wasuponda	26 unit	8.470.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kantor Kec. Wasuponda	2 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kantor Kec. Wasuponda	2 Unit	20.000.000	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Presentase Capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**1.580.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Presentase Capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**1.580.000**	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Presentase Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	100 %	1.580.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Presentase Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	100 %	1.580.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah IMB yang diterbitkan (IMB)	Kantor Kec. Wasuponda	4 Dokumen	1.580.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah IMB yang diterbitkan (IMB)	Kantor Kec. Wasuponda	4 Dokumen	1.580.000	
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Presentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**111.844.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Presentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**111.844.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	100%	116.844.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	100%	116.844.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Masyarakat	Kantor Kec. Wasuponda	140 Orang	14.524.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Masyarakat	Kantor Kec. Wasuponda	140 Orang	14.524.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan PKK	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	102.320.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan PKK	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	102.320.000	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**14.645.300**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**14.645.300**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kec. Wasuponda	100 %	10.221.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kec. Wasuponda	100 %	10.221.500	
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas Yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	3.131.500	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas Yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	3.131.500	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	7.090.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	7.090.000	

		Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	Kantor Kec. Wasuponda	100%	4.423.800	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	Kantor Kec. Wasuponda	100%	4.423.800	
	Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsunya Dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	4.423.800	Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsunya Dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan li	4.423.800	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**20.500.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**20.500.500**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang di selenggarakan	Kantor Kec. Wasuponda	100%	20.500.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang di selenggarakan	Kantor Kec. Wasuponda	100%	20.500.500	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumenyang dihasilkan dalam kegiatan Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan.	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	20.500.500	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumenyang dihasilkan dalam kegiatan Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan.	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	20.500.500	
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**9.018.250**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**9.018.250**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangkah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	9.018.250	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangkah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	9.018.250	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Kantor Kec. Wasuponda	5 Kasus	3.655.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Kantor Kec. Wasuponda	5 Kasus	3.655.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	5.363.250	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	5.363.250	
JUMLAH TOTAL					**2.774.336.400**	**JUMLAH TOTAL**				**2.774.336.400**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Wasuponda pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
5. Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat.

Sinkronisasi program prioritas Kecamatan Wasuponda yang telah ditetapkan dan dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh Tim Perencanaan Daerah (Bapelitbangda) yang kemudian oleh Kecamatan Wasuponda dan diperjelas dalam bentuk program prioritas dengan indikator keluaran / sasaran yang jelas.
- Penyusunan rumusan program dan kegiatan Program prioritas pada Kecamatan Wasuponda di asistensi oleh tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari Bapelitbangda dan BPKD, untuk selanjutnya didiskusikan apakah kegiatan yang diusulkan itu relevan dengan keadaan sekarang/satu tahun kedepannya.
- Hasil dari rumusan tim TAPD ini selanjutnya di bahas di DPRD dengan agenda pembahasan anggaran kecamatan untuk selanjutnya disahkan untuk menjadi bahan dalam menyusun RKPD Tahun berikutnya.
- Program prioritas dan pagu indikatif hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan kemudian akan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.

- Hasil Musrenbang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun berikutnya.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Wasuponda hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan MUSRENBANG dan berlangsung hanya sehari, sehingga waktu untuk melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa/Kec. dan Kab. /DPRD sebagai pemegang kendali kebijakan eksekutif/legislatif tidak bisa berjalan secara optimal. Mekanisme perencanaan melalui MUSRENBANG secara berjenjang yang bahkan dilengkapi dengan reses yang dilakukan oleh para legislator masih belum mampu mengakomodir keinginan atau kebutuhan masyarakat.

Kendala lain yang sering ditemui pada Musrenbang tingkat Kecamatan yaitu usulan-usulan yang diajukan terlalu mikro dan lebih dominan pada pembangunan fisik. Disamping itu sering ditemui dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang mengutarakan pendapat hanya segelintir orang.

BAB III
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kinerja Pelayanan Kantor Camat Wasuponda secara teknis mengacu pada kebijakan Pembangunan Nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada :

a. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional (Nawacita)
   1. Meningkatkan Kwalitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia (Nawacita 5).
   2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan Sektor- sektor Strategis Ekonomi Domestik (Nawacita 7).

b. Prioritas RKP Provinsi
   1. Peningkatan Kwalitas Pelayanan untuk Pemenuhan Hak Dasar
   2. Pengembangan Energi dan Infrastruktur Wilayah
   3. Peningkatan Kwalitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Wasuponda

Penetapan tujuan dan sasaran SKPD pada umumnya didasari oleh faktor- faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar SKPD yang bersangkutan mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktifitas yang tidak tercapai, karena dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan berarti SKPD tersebut mengetahui kelebihan atau kekuatannya untuk melaksanakan suatu sasaran dan aktifitasnya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu SKPD atau instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Adapun tujuan Rencana Kerja Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang telah diterapkan adalah sebagai berikut : ***Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan***. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu perhatian akan 2 hal pokok yang menjadi komponen tujuan tersebut, yakni :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas baik sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang merupakan pelaksana pelayanan publik,
2. Peningkatan program dan kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sebagaimana yang terdapat pada Renstra Kecamatan Wasuponda Tahun 2025-2029, sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan Renja Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan

Tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat Wasuponda Tahun 2026 disajikan dalam lampiran **Tabel. 4**.

Tabel. 4
Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Wasuponda
Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KET.
1	2	3	4	6	11
-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik -PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang menjadi	Menibgkatnya Kualitas Pekayanan Publik	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,25	

-Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik (S13)	kewenangan kecamatan (T1)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	63,5	

3.3. Program Dan Kegiatan

Sebagai unit kerja pemerintahan yang berada pada tingkat kecamatan, peran strategis kecamatan dalam menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan/desa menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam dokumen rencana kerja 2026 ini, dijabarkan berbagai program, kegiatan yang akan dilaksakanan oleh Kecamatan Wasuponda.

Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan tahun yang akan datang. Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Wasuponda pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
        - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
        - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    a. Kegiatan Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
        - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi/SInergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Penagwasan Pemerintahan Desa
   a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara lebih rinci rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Wasuponda untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel .5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2024
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		2026			
		TARGET	PAGU		
-1	*-2*	*-4*	*-5*	*-14*	*-15*
7.01 - KECAMATAN			3.433.012.870		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.287.004.120		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	3.287.004.120	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.512.000		
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (&%)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	68.512.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2			

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			34.416.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	34.416.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.900.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.900.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.600.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	5.600.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.596.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	24.596.000		
Tersedianya dokumen perencanaan, pengangaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			0		

7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.725.859.120		
Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (&%)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	2.725.859.120		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.705.228.520		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	2.705.228.520		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			20.630.600		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	20.630.600		
Tersedianya administrasi laporan keuangan perangkat daerah			0		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.764.000		

Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (&%)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	12.764.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.764.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	12.764.000		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			0		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.237.000		
Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (&%)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	29.237.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4			
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4.297.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	4.297.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			24.940.000		

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	24.940.000		
Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah			0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			235.045.900		
Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (&%)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	235.045.900		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	36			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36			

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.545.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	4.545.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	0		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.073.900		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	12.073.900		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.720.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	7.720.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	1.200.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu			104.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	36	104.500.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			105.007.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400	105.007.000		
Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah			0		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.753.000		
Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (&%)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	13.753.000		
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.253.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.253.000		

7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.500.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3.500.000		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138.013.100		
Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (&%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	138.013.100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.095.100		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12.095.100		

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	42.000.000		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.700.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	8.700.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			75.218.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	75.218.000		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			0		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.820.000		
Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (&%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	63.820.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10			

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			30.440.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	30.440.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	5.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.380.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	8.380.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita			20.000.000		

si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	20.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.840.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	2.840.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2.840.000		
Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (&%)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	2.840.000		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			2.840.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	2.840.000		
Terlaksanya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		12	0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			96.066.000		

Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	96.066.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			96.066.000		
Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (&%)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	96.066.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			15.364.000		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	15.364.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			80.702.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	80.702.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			17.584.500		
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	17.584.500	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			13.161.500		

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	13.161.500		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	8			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4.811.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	4.811.500		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			8.350.000		

Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	8	8.350.000		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0		
Terlaksananya koordinasi upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum			0		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			4.423.000		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	6	4.423.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			4.423.000		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	6	4.423.000		
Terlaksananya kordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			0		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			20.500.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	20.500.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.500.000		
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (&%)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	20.500.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			20.500.000		

Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	20.500.000		
Terlaksananya penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			0		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9.018.250		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	9.018.250	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.018.250		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			0		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			0		
Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (&%)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	9.018.250		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	4			

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3.655.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	3.655.000		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			0		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	4	0		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			5.363.250		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	5.363.250		
Tersedianya fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			0		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
TAHUN 2026

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasinalkan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi Jangka Menengah Daerah. Dengan rencna kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pemangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berpodoman pada Renstra Kecamatan Wasuponda Kabupeten Luwu Timur dan mengacuh pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Wasuponda merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Wasuponda. Keduanya merupakan penjabaran dari undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas pereturan menteri dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang podoman tata cara pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah. Dengan demikian Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2026. Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Wasuponda sebesar Rp. 3.433.012.866 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Belas ibu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) Program , 14 (Empat Belas) Kegiatam dan 32 (Tiga Puluh Dua Sub Kegiatan) yang akan di laksanakan pada Tahun 2026.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kantor Camat Wasuponda dapat dilihat dalam **Tabel. 6** :

Tabel. 6 :
Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**3.287.002.816**	**APBD**

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**68.512.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	34.416.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	3.900.000	**APBD**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	2 dokumen	5.600.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	10 Laporan	24.596.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**2.691.248.820**	**APBD**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kantor Kec. Wasuponda	21 orang	2.670.618.820	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Kec. Wasuponda	19 Laporan	20.630.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	Kantor Kec. Wasuponda	100%	**2.746.000**	**APBD**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Wasuponda	4 Laporan	2.746.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	Kantor Kec. Wasuponda	100%	**29.237.000**	**APBD**

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kantor Kec. Wasuponda	4 Orang	24.940.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	4.297.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**235.045.900**	**APBD**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kantor Kec. Wasuponda	20 Paket	4.545.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kantor Kec. Wasuponda	7 Paket	12.073.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kantor Kec. Wasuponda	5 Paket	7.720.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	1.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	36 Laporan	104.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	400 Laporan	105.007.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**138.013.100**	**APBD**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	12.095.100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	12 rekening	42.000.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	2 Jenis	8.700.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	7 Orang	75.218.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)**	Kantor Kec. Wasuponda	100%	**58.820.000**	**APBD**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kantor Kec. Wasuponda	8 unit	30.440.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kantor Kec. Wasuponda	10 unit	8.380.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kantor Kec. Wasuponda	2 unit	20.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**2.840.000**	**APBD**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**2.840.000**	**APBD**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	**2.840.000**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**96.066.000**	**APBD**

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**96.066.000**	**APBD**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Kantor Kec. Wasuponda	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.364.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	80.702.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**17.585.300**	**APBD**
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Keutentraman dan Ketertiban Umum	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**13.161.500**	**APBD**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	4.811.500	
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	8 Laporan	8.350.000	
	Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang berjalan sesuai standar (%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**4.423.000**	**APBD**

	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara nrepublik indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Kantor Kec. Wasuponda	6 Dokumen	4.423.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar ('%)**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**20.500.500**	**APBD**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)**	Kantor Kec. Wasuponda	**100%**	**20.500.500**	**APBD**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	20.500.500	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**9.018.250**	**APBD**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%)**	**Kantor Kec. Wasuponda**	**100%**	**9.018.250**	**APBD**
	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Kantor Kec. Wasuponda	12 Dokumen	3.655.000	

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Wasuponda	12 Laporan	5.363.250	
JUMLAH TOTAL					**3.433.012.866**	

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Wasuponda dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Wasuponda

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Wasuponda. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Wasuponda ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis Kec. Wasuponda Tahun 2025-2029, maka dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh
5. aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
6. Isi dari Renja Kecamatan Wasuponda pada intinya merupakan uraian proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur secara optimal, juga mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
7. Demikian Dokumen Rencana kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan kinerja SKPD khususnya Kantor Camat Wasuponda untuk tahun 2026 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Wasuponda untuk Tahun 2026 sangat tergantung pada kinerja seluruh aparatur yang berada di bawah lingkup pemerintahan Kecamatan Wasuponda serta dukungan penuh dari masyarakat, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait di wilayah Kecamatan Wasuponda.
9. Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur kedepannya , Amin.

Wasuponda, 02 April 2025
Camat Wasuponda,

ALAMSYAH, S.STP
Pangkat : Penata TK.I, III/d
NIP : 19930318 201406 1 002